

## IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA SEKOLAH DASAR (SD) DI KECAMATAN PRAYA BARAT

Nefan Satria Fajar Wengga<sup>1\*</sup>, Muhammad Cholifihani<sup>2</sup>, Agung Edi Rustanto<sup>3</sup>,  
Harits Hijrah Wicaksana<sup>4</sup>, Agung Panglima Putra Lodong<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia  
<sup>5</sup> Universitas Presiden, Jawa Barat, Indonesia

\*Korespondensi : nefansatria@gmail.com

### ABSTRAK

Studi ini menyelidiki penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar di wilayah Praya Barat dengan penekanan khusus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Salah satu masalah yang diangkat adalah bahwa kurikulum masih sulit diterapkan di tingkat sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses implementasi kurikulum serta tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum dihadapkan pada kendala komunikasi yang belum berjalan efektif, keterbatasan dalam sumber daya seperti bahan ajar, pelatihan guru, dan teknologi, serta kesiapan pelaksana yang belum merata. Selain itu, struktur organisasi sekolah masih bersifat administratif dan kurang mendukung fleksibilitas dalam perubahan kebijakan. Sekolah-sekolah telah membentuk tim pelaksana untuk menyesuaikan kebijakan dengan situasi sekolah masing-masing dalam upaya lokal. Studi ini menemukan bahwa kekuatan komunikasi, ketersediaan sumber daya, kesiapan pelaksana, dan kemampuan struktur organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan adalah faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

**Kata Kunci :** Kurikulum Merdeka, Implementasi Kebijakan, Sekolah Dasar, Edward III, Praya Barat

### ABSTRACT

*This study investigates the implementation of the Independent Learning Curriculum in elementary schools in West Praya, with a particular emphasis on factors influencing its success. One issue raised is that the curriculum remains difficult to implement at the school level. The purpose of this study is to describe the curriculum implementation process and the challenges faced by schools. The approach used was descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that curriculum implementation faces obstacles such as ineffective communication, limited resources such as teaching materials, teacher training, and technology, and uneven implementation readiness. Furthermore, the school organizational structure remains administrative and lacks flexibility in policy changes. Schools have formed implementation teams to adapt policies to their respective school situations through local efforts. This study found that strong communication, resource availability, implementation readiness, and the*

*organizational structure's ability to adapt to change are key factors in the successful implementation of the curriculum.*

**Keywords :** *Independent Curriculum, Policy Implementation, Elementary School, Edward III, West Praya.*

## A. PENDAHULUAN

Sekolah Dasar (SD) bertanggung jawab secara strategis untuk membangun karakter, kecerdasan, dan keterampilan dasar siswa sebagai dasar menuju jenjang pendidikan berikutnya. Karena anak-anak berada dalam fase perkembangan kognitif dan sosial yang pesat, intervensi pendidikan yang tepat pada jenjang ini akan berdampak besar pada kualitas sumber daya manusia di masa depan (Suyadi & Ulfah, 2013; Lestari, Asbari, & Yani, 2023). Pendidikan dasar adalah bagian penting dari pembangunan nasional, dan keberhasilan kebijakan publik di bidang pendidikan sebagian besar diukur melalui kualitas pendidikan dasar (Kristian, 2023).

Sejak tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI telah menetapkan kebijakan kurikulum bebas sebagai bagian dari program belajar bebas. Kebijakan ini diperkuat oleh Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan akan pembelajaran yang lebih adaptif dan kontekstual. Kurikulum bebas memberi sekolah kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan siswa dan menekankan pendekatan berpusat pada siswa dengan profil siswa Pancasila (Kemendikbudristek, 2022). Pembelajaran di SD diarahkan pada penguatan literasi, numerasi, dan karakter melalui kegiatan

yang menyenangkan dan kontekstual (Zulaiha, Meisin, & Meldina, 2023).

Menjalankan kebijakan ini di berbagai wilayah masih menghadapi tantangan yang signifikan. Di daerah seperti Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada banyak masalah. Ini termasuk kekurangan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan kesulitan memahami tujuan dari kurikulum baru. Yuliani (2023) menemukan bahwa kebanyakan guru di daerah tersebut belum memahami konsep Kurikulum Merdeka secara menyeluruh, terutama dalam membuat kegiatan yang berfokus pada pencapaian. Ariyanti et al. (2023) menyatakan bahwa dua tantangan utama yang sering terjadi adalah kurangnya pelatihan dan kurangnya pemahaman tentang struktur kurikulum.

Dalam teorinya tentang implementasi kebijakan, George C. Edward III (1980) menekankan empat komponen utama yang menentukan keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi mencakup kejelasan informasi kebijakan, sumber daya yang mencakup sarana dan sumber daya manusia, disposisi yang berkaitan dengan motivasi pelaksana, dan struktur birokrasi yang berkaitan dengan prosedur kerja (Agustino, 2020; Ridhotuloh et al., 2024). Dwi et al. (2024) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kurikulum termasuk kurangnya komunikasi antara pemerintah

pusat dan satuan pendidikan serta kurangnya pelatihan dan pengawasan dari birokrasi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana keempat variabel tersebut memengaruhi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar, khususnya di wilayah Praya Barat. Diharapkan penelitian ini dapat membantu membangun strategi pelaksanaan kebijakan yang lebih kontekstual dan efisien untuk satuan pendidikan dasar di daerah serupa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk memahami implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar (SD), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan makna, proses, dan dinamika sosial yang terjadi dalam lingkungan alam (Creswell, 2015; Merriam & Tisdell, 2016). Fokus penelitian ini adalah pemahaman subjektif pelaku pendidikan terhadap kebijakan kurikulum yang diterapkan.

Untuk mengumpulkan data, observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi digunakan. Menurut Sugiyono (2017), informan diidentifikasi menggunakan teknik sampling purposive dan snowball. Mereka dipilih berdasarkan standar tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Sementara wawancara diarahkan pada kepala sekolah, guru, dan pengawas, observasi dilakukan di lingkungan sekolah dan di ruang kelas. Untuk mendapatkan cerita yang kaya dan bermakna, wawancara dilakukan secara terbuka (Merriam & Tisdell, 2016). Alat

perekam suara digunakan untuk merekam dan mencatat seluruh wawancara.

Materi penelitian digunakan secara menyeluruh selama proses penelitian, dan mencakup dokumen sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, termasuk pedoman wawancara dan lembar observasi. Materi ini tidak dibahas secara terpisah seperti yang disarankan oleh pedoman penulisan ilmiah. Sebelum mereka dapat mengumpulkan data, peneliti harus mendapatkan izin resmi dari sekolah dan semua pihak yang terlibat. Sumber data termasuk foto kegiatan, salinan RPP, program sekolah, dan bahan ajar.

Penelitian dilakukan secara sistematis setelah penjajakan awal lokasi, pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Peneliti mencatat secara menyeluruh suasana kelas, penggunaan media pembelajaran, dan partisipasi siswa. Wawancara dilakukan di tempat yang disepakati bersama dan berlangsung selama 30 hingga 60 menit per informan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dari Kushnir (2015), yang mencakup enam tahapan: familiarisasi data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan dan definisi tema, serta penyusunan laporan. Selain itu, digunakan juga teknik analisis Miles, Huberman & Saldana (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk memastikan keabsahan data, disertai dengan member check dan diskusi antar peneliti untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Melalui prosedur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran

yang komprehensif tentang implementasi Kurikulum Merdeka pada konteks pendidikan dasar di Praya Barat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan karena tingkat komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana lapangan sangat menentukan efektivitas implementasi. Komunikasi yang baik harus mudah dipahami, konsisten, dan jelas. Komunikasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas pendidikan daerah dan sekolah-sekolah sangat penting untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Jika komunikasi menjadi salah atau informasi menjadi ambigu, pelaksana tidak dapat memahami substansi kebijakan. Hal ini dapat berdampak pada interpretasi yang berbeda antar pelaksana, serta munculnya resistensi atau kesalahan dalam proses implementasi.

Menurut Listiana et al. (2025), kebijakan publik mencakup pemahaman pelaksana serta peraturan yang ditulis. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh dokumen kurikulum, tetapi juga oleh seberapa baik informasi tersebut disampaikan kepada guru dan kepala sekolah. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai buku pedoman, pelatihan online, dan sosialisasi, banyak guru masih belum memahami sepenuhnya pentingnya Kurikulum Merdeka. Kegagalan komunikasi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan digital, keterbatasan waktu, atau kendala geografis di beberapa lokasi.

Edward III (1980) memperkuat

argumen bahwa isi kebijakan dan cara orang berkomunikasi sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Kemungkinan kegagalan implementasi meningkat jika komunikasi hanya mengandalkan satu arah dari pusat ke daerah dan tanpa umpan balik yang sistematis dari pelaksana di lapangan. Beberapa guru berpendapat bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka dilakukan secara top-down, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan prosedur teknis untuk melaksanakannya. Hal ini menyebabkan perbedaan antara kenyataan di lapangan dan harapan kebijakan pusat, terutama di sekolah dasar (SD) dengan sumber daya terbatas.

Studi Jamaludin, Marini, dan Zulela (2023) menemukan bahwa peran aktif kepala sekolah dalam memberikan informasi kepada guru sangat dipengaruhi oleh keberhasilan komunikasi dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah yang responsif dan komunikatif mampu menjembatani informasi dari dinas pendidikan kepada guru secara efektif melalui forum harian dan platform online. Sebaliknya, sekolah yang kepala sekolahnya pasif atau tidak memahami substansi kurikulum, komunikasi menjadi lemah, dan pelaksana kebijakan menjadi bingung.

Menurut Lestari, Asbari, dan Yani (2023), komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar guru dalam komunitas belajar, juga penting. Komunitas belajar guru—juga dikenal sebagai Komunitas Praktisi—menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman saat menerapkan Kurikulum Merdeka. Namun, keaktifan komunitas ini sangat berbeda dari sekolah ke sekolah. Di sekolah lain, komunitas belajar buruk, tetapi guru aktif

berbicara dan berbagi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia, tetapi juga pada kebiasaan komunikasi yang ada di lingkungan sekolah.

Menurut Nugroho (2018), kebijakan publik yang baik tidak akan bertahan lama jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Pemerintah telah membuat rencana komunikasi untuk Kurikulum Merdeka, yang mencakup modul digital, webinar, dan platform media sosial. Tetapi masih ada hambatan, terutama di sekolah-sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang tidak memiliki akses internet yang baik. Ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan infrastruktur yang ada di masing-masing wilayah harus dipertimbangkan untuk komunikasi kebijakan yang efektif.

Dalam penelitian mereka, Zulaiha, Meisin, dan Meldina (2023) menemukan bahwa cara pesan kebijakan disampaikan sangat memengaruhi persepsi pelaksana kebijakan. Dibandingkan dengan guru yang hanya menggunakan internet untuk belajar mandiri, guru yang dapat berkomunikasi langsung dengan dinas atau pengawas lebih percaya diri dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Terbukti bahwa komunikasi yang bersifat individual dan interaktif lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan guru.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai adalah kunci keberhasilan penerapan kebijakan. Sumber daya manusia, keuangan, dan material yang terbatas menghalangi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk membuat proses pembelajaran lebih kontekstual dan

menyenangkan, kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru menjadi hambatan utama yang menghambat pelaksanaannya dengan baik.

Kualitas pembelajaran berdiferensiasi rendah karena guru tidak memahami filosofi dan teknis Kurikulum Merdeka. Sumber daya manusia yang tidak memadai cenderung menyebabkan interpretasi kebijakan yang salah, seperti yang dijelaskan oleh (Listiana et al., 2025). Hal ini diperparah oleh kekurangan sumber daya pendukung seperti media pembelajaran digital, jaringan internet yang stabil, dan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum baru.

Sebaliknya, pemerintah, melalui Kemendikbudristek, telah menyediakan kursus online dan platform Merdeka Mengajar. Namun, banyak lembaga pendidikan, terutama di wilayah yang dikenal sebagai 3T Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal masih kekurangan akses yang memadai terhadap pelatihan tersebut (Jamaludin, Marini, & Zulela, 2023). Oleh karena itu, guru lebih cenderung menerapkan kurikulum sesuai dengan pemahaman masing-masing, yang sering menyimpang dari tujuan awal.

Dukungan dana operasional juga sangat penting. Menurut Laporan Sumarmi (2023), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan untuk pembelian fasilitas Kurikulum Merdeka masih sangat terbatas dan tidak merata di semua wilayah. Sekolah tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan sarana yang diperlukan untuk menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang merupakan fokus utama kurikulum, karena kondisi ini.

Selain itu, faktor yang memperlambat kesiapan pelaksanaan

kebijakan ini dari sudut pandang struktur organisasi adalah kurangnya pengawasan dan arahan dari pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Edward III (1980) menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kinerja lembaga pelaksana dan ketersediaan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, selama tahap evaluasi dan tindak lanjut kebijakan ini, perbaikan dalam hal sumber daya harus menjadi perhatian utama.

Pendekatan desentralisasi pendidikan dalam Kurikulum Merdeka, menurut Nugroho (2018), seharusnya memungkinkan sekolah untuk berinovasi, tetapi sumber daya terbatas menyebabkan disparitas antar wilayah. Sekolah negeri dan swasta berbeda dalam kesiapan, dan sekolah di kota dan desa berbeda dalam kesiapan. Hal ini menunjukkan perbedaan ini.

Pemerintah harus meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan melibatkan lebih banyak pihak swasta, LSM, dan komunitas pendidikan untuk mengatasi masalah sumber daya. Kolaborasi multi-pihak dapat memperluas akses guru dan siswa terhadap pelatihan, menurut Lestari, Asbari, dan Yani (2023). Dengan adanya dukungan sumber daya yang memadai dan merata, implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar akan lebih optimal dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

### 3. Disposisi Pelaksana

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan. Menurut Edward III (1980), jika pelaksana tidak memiliki sikap atau komitmen positif terhadap kebijakan yang diterapkan, kebijakan tersebut akan sulit berhasil

meskipun memiliki sumber daya dan struktur yang cukup. Disposisi pelaksana, khususnya guru dan kepala sekolah, sangat penting untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Guru-guru tertentu sangat tertarik dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berfokus pada kebutuhan siswa. Ini tercermin dalam keinginan mereka untuk mengikuti kursus Kurikulum Merdeka dan membuat perangkat ajar yang sesuai. Namun, banyak guru menganggap kurikulum ini sebagai keharusan karena tekanan dari atasan atau undang-undang, bukan karena pemahaman dan keyakinan akan pentingnya (Mayangsari et al., 2024).

Tidak memahami filosofi Kurikulum Merdeka, beberapa pendidik menjalankan pembelajaran secara administratif tanpa mengubah pendekatan pedagogis. Menurut Listiana et al. (2025), disposisi pelaksana seperti ini dapat menyebabkan resistensi pasif, yaitu ketika pelaksana menjalankan kebijakan secara formal tetapi tidak dengan semangat transformasi.

Faktor lain yang mengurangi keinginan adalah kurangnya penghargaan atau insentif untuk pelaksana Kurikulum Merdeka yang berhasil. Ada situasi di mana guru yang berinovasi secara aktif tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah atau dinas. Akibatnya, mereka merasa tidak diapresiasi (Zulaiha, Meisin, & Meldina, 2023). Situasi seperti ini menimbulkan masalah psikologis dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Menurut Listiana et al. (2025), orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk keberhasilannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk memberikan pelatihan ideologis dan

teknis agar pelaksana memahami visi besar kurikulum dan merasa terlibat dalam perubahan tersebut.

Kepemimpinan kepala sekolah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat satuan pendidikan juga penting. Kepala sekolah yang tidak proaktif akan menghambat upaya guru untuk berinovasi, sedangkan kepemimpinan yang visioner dan mendukung dapat meningkatkan motivasi guru.

Sebagai bentuk perbaikan, perlu adanya evaluasi terhadap disposisi pelaksana secara berkala. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup aspek sikap dan komitmen terhadap kurikulum. Pelibatan pelaksana dalam proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan, sehingga pelaksanaan menjadi lebih maksimal.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang kompleks dapat menjadi salah satu alasan mengapa implementasi kebijakan sulit dilakukan. Menurut Hartawan dan Kosasih (2023), jika ada tumpang tindih kewenangan di antara lembaga atau jika birokrasi tidak bekerja sama dengan baik, kebijakan akan sulit dilaksanakan secara konsisten. Struktur birokrasi pendidikan yang panjang dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka menyebabkan banyak kendala dalam komunikasi dan koordinasi.

Rantai birokrasi yang panjang sering menghambat penyebaran informasi dari pemerintah pusat ke sekolah. Sebagai contoh, surat edaran atau pedoman pelaksanaan seringkali sampai ke sekolah lebih lama daripada yang diharapkan, atau bahkan tidak sampai sama sekali, yang menyebabkan kebingungan tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan di

lapangan. Hasil Suhandi dan Robi'ah (2022) yang menyatakan bahwa ketidakefektifan birokrasi lokal menyebabkan implementasi kebijakan tidak seragam antar daerah, memperkuat temuan ini.

Selain itu, karena pengawas sekolah tidak memiliki peran yang kuat dalam mendampingi dan mengawasi, sekolah cenderung bergantung pada diri mereka sendiri untuk memahami dan menginterpretasikan Kurikulum Merdeka. Struktur pengawasan yang tidak efektif ini menyebabkan implementasi kurikulum tidak berjalan dengan baik karena tidak ada sistem kontrol yang kuat dari lembaga yang berwenang.

Selain itu, ketidaksesuaian struktur birokrasi terlihat dalam pelaksanaan asesmen nasional dan pengelolaan platform digital Merdeka Mengajar. Banyak sekolah menghadapi kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan platform karena dinas pendidikan tidak memberikan pelatihan atau bantuan teknis. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintah masih gagal menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk menerapkan kebijakan berbasis digital.

Dalam hal wewenang, masih ada perbedaan antara tanggung jawab pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan pendidikan. Meskipun otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah lokal, pusat biasanya membuat keputusan. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Menurut Nugroho (2018), struktur birokrasi sistem pendidikan Indonesia masih berbasis top-down, sehingga mengurangi partisipasi pelaksana lapangan. Akibatnya, tidak ada inovasi dan

keterlibatan aktif dari satuan pendidikan sebagai pelaksana utama kurikulum.

Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan menyederhanakan alur birokrasi dan memperkuat peran lembaga penghubung antara pusat dan sekolah, seperti pengawas dan kepala dinas. Selain itu, penggunaan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk mempercepat penyampaian informasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Dengan restrukturisasi birokrasi yang adaptif dan kolaboratif, pelaksanaan Kurikulum Merdeka akan lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan satuan pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa struktur birokrasi tidak menjadi penghambat, melainkan fasilitator dalam menciptakan transformasi pendidikan yang berkelanjutan.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa, meskipun rumit, penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar menunjukkan perkembangan yang positif. Keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada komunikasi yang aktif antara pemangku kepentingan seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas. Efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan prasarana yang memadai. Selain itu, transformasi pendidikan di sekolah dasar sangat didukung oleh pelaksana yang menunjukkan komitmen yang kuat dan memahami pentingnya Kurikulum Merdeka. Struktur birokrasi yang responsif dan fleksibel juga memungkinkan terciptanya ruang inovasi dan kolaborasi yang lebih luas.

Penelitian ini baru-baru ini menekankan konteks lokal dalam

pelaksanaan kebijakan pendidikan. Konteks lokal selama ini kurang diperhatikan. Pendekatan deskriptif kualitatif penelitian menggali pengalaman pelaku kebijakan di lapangan secara menyeluruh, yang menunjukkan keorisinilan penelitian. Selain itu, penelitian ini menarik karena mengamati bagaimana Kurikulum Merdeka berjalan selama transisi dari kurikulum sebelumnya. Penemuan ilmiah dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang komponen yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan, terutama dalam konteks yang sangat beragam dari Indonesia.

Hasil penelitian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang elemen komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dapat membantu merancang pelatihan guru, meningkatkan kemampuan manajerial kepala sekolah, dan membuat sistem pendukung yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum. Secara sosial, hasil penelitian ini mendorong pembentukan lingkungan pendidikan yang lebih berpartisipasi dan berfokus pada kebutuhan siswa. Jika digunakan secara kontekstual, kurikulum bebas dapat membantu memperkuat identitas lokal dan prinsip kebhinekaan.

Dalam bidang ekonomi, penerapan kurikulum ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan daya saing bangsa. Sementara itu, secara politik, temuan penelitian ini

memberi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan garis besar dan metode untuk menerapkan kurikulum nasional yang lebih realistis dan dapat diukur. Penguatan regulasi turunan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum juga dapat membantu mengurangi dampak hukum.

Akibatnya, temuan penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik tetapi juga memberikan manfaat praktis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan yang bebas, berkualitas, dan berkeadilan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan mendalam serta kerjasama multipihak.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta, Bandung.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. *Congressional Quarterly Press, Washington D.C.*
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.)*. *Jossey-Bass, San Francisco*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. *Sage Publications, Thousand Oaks*.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Jurnal:
- Ariyanti, M., Rahmawati, D., & Lestari, N. (2023). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 11(2), 122–134.
- Bangkara, B. A. S., Pattiasina, P. J., Fatmawati, E., Heryani, A., & Damayanto, A. (2022). *Relevance of education policy and implementation in Indonesia: A study of the public service literature*. *Linguistics and Culture Review*, 6(S5), 216–232.
- Dwi, A. N., Hartati, S., & Kurniawan, A. (2024). Kendala pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam konteks kebijakan desentralisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 33–45.
- Hartawan, R. C., & Kosasih, F. (2023). *Implementation of the Van Meter and Van Horn zoning system policies model*. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 2(4), 1348–1358.
- Jamaludin, R., Marini, A., & Zulela, M. S. (2023). Strategi kepala sekolah dalam menyukseskan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 5(1), 45–59.
- Kristian, E. (2023). Pendidikan dasar sebagai fondasi kebijakan pembangunan SDM. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1), 88–96.
- Kushnir, I. (2025). *Thematic analysis in the area of education: a practical guide*. *Cogent Education*, 12(1),

- 2471645.
- Lestari, S., Asbari, M., & Yani, A. (2023). Peran komunitas praktisi dalam implementasi kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 14(3), 101–115.
- Listiana, Y. D., Yumame, J., & Pugu, M. R. (2025). *Public policy implementation: Challenges and solutions in achieving people's welfare. Public Policy Implementation Journal (MORFAI)*, 5(1)
- Mayangsari, T., Wibowo, R., & Nurhidayati, D. (2024). Sikap pelaksana terhadap Kurikulum Merdeka. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 6(2), 67–78.
- Ridhotuloh, M., Pratama, H., & Sulisty, B. (2024). Faktor birokrasi dalam kebijakan pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 23–38.
- Suhandi, A., & Robi'ah, I. (2022). Struktur birokrasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 142–150.
- Yuliani, D. (2023). Pemahaman guru terhadap Kurikulum Merdeka di daerah 3T. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 9(3), 177–189.
- Zulaiha, N., Meisin, I., & Meldina, R. (2023). Efektivitas pelatihan dalam penerapan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Guru*, 8(2), 56–70.
- Peraturan:  
Kemendikbudristek. 2022. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 601*.